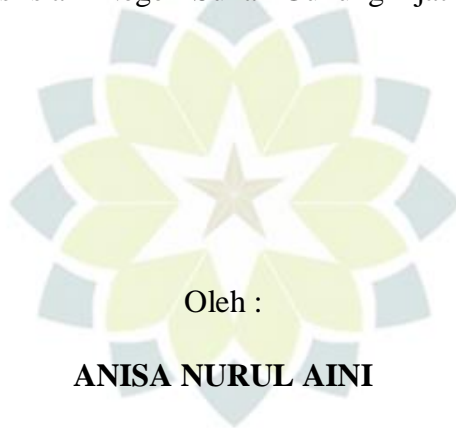


**PENGARUH BELANJA LANGSUNG TERHADAP SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 – 2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Oleh :

ANISA NURUL AINI

1138010027

UIN

BANDUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2017 M/1438 H

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH BELANJA LANGSUNG TERHADAP SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2006-2015

Oleh :

Anisa Nurul Aini

1138010027

Meenyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si.
NIP. 196705151994031006

Drs.Heldi, M.Pd.
NIP.196304141993031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan

Khaerul Umam, S.IP., M.Ag
NIP.198611212009011002

Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si.
NIP. 196705151994031006

PERNYATAAN

Bismillahirraahmanirraahim,

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarangnya.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, November 2017

Yang membuat pernyataan,

ANISA NURUL AINI
(NIM.1138010027)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya (Eunhyuk)”

“Tidak ada yang tidak mungkin jika kau mau mencoba (Kai)”

“Jika memang itu jalan yang kamu pilih. Kamu harus tetap menjalaninya hingga akhir apapun yang terjadi (Luhan)”

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua tercinta
2. Kakak-kakak ku tersayang
3. Keluarga besarku
4. Semua teman-temanku

Terima kasih atas semua doa, dukungan,
Motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Anisa Nurul Aini, di lahirkan di Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Mei 1995, anak ke-5 dari Bapak Hidayat dan Ibu Surtini. Peneliti bertempat tinggal di Kp. Cikandang RT 001 RW 022 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan di SDN Cijati II Kabupaten Bandung lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Jawami di Kabupaten Bandung lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMK Mekar Galih Jurusan Administrasi Perkantoran di Kabupaten Bandung lulus tahun 2013. Dan kemudian peneliti melanjutkan pendidikan program (S-1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2013 lulus tahun 2017.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ABSTRAK

Anisa Nurul Aini : Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015

Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan belanja daerah setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah dengan belanja langsung yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terjadi ketidakkonsistenan realisasi belanja langsung sehingga mempengaruhi sisa anggaran di akhir tahun pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015. Hal ini dibuktikan dengan realisasi belanja langsung yang tidak terealisasi seluruhnya membuat sisa anggaran di akhir menumpuk dan pelayanan kepada publik pun tidak maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh parsial serta simultan belanja modal dan belanja barang dan jasa dalam belanja langsung terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu belanja langsung sebagai variabel X dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai variabel Y. Penulis menggunakan teori belanja langsung dari Mursyidi (2013) yang terdiri dari dimensi-dimensi diantaranya belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk variabel Y sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) penulis menggunakan teori Baldrice Siregar (2015).

Metode penelitian menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan. Pengujian statistik yang digunakan adalah dengan uji asumsi klasik, uji parsial dan uji simultan dengan analisis regresi berganda dan koefisien determinasi.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) karena $t_{hitung} (-0,137) < t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,895 > 0,05$ maka H_0 diterima, variabel belanja barang dan jasa secara parsial berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) karena $t_{hitung} (2,995) > t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,020 > 0,05$ maka H_0 ditolak. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh secara simultan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(12,197) > (5,32)$ maka H_0 ditolak dengan persentase pengaruh variabel X (belanja modal, dan belanja barang dan jasa) terhadap variabel Y sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 0,659 atau 65,9% sedangkan 34,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : Belanja Langsung (Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

ABSTRACT

Anisa Nurul Aini : The influence of Direct Expenditures Toward the rest of the More Budget Financing (SILPA) Bandung Regency Years 2006-2015

Bandung Regency Government doing the shopping area each year to improve the quality of public services, one of which is by shopping directly budgeted is directly related to the implementation of programs and activities. A phenomenon that occurs in this study i.e., the realization of direct spending of inconsistencies occur so as to affect the remainder of the budget at the end of the year at the Department of revenue and financial management (DPPK) Bandung District in 2006-2015. This is proven by the realization of the direct expenditures that do not make the rest of the budget entirely realised in the end piling and service to the public was not the maximum.

The purpose of this study is to analyze and find out the magnitude of the influence of partial as well as simultaneous capital spending and shopping goods and services in direct expenditures toward the rest of the more budget financing (SILPA) in Bandung District in 2006-2015.

This research consists of two variables, namely direct shopping as the variable X and the rest of the more budget financing (SILPA) as the variable Y. Writers use theory of shopping directly from Mursyidi (2013) which consists of the dimensions of which are capital expenditures and shopping goods and services. As for the rest of the Y variables more financing budget (SILPA) the author uses the theory of Baldric Siregar (2015).

Research methods method using a quantitative approach with associative. The technique of data collection conducted in this research is the study of librarianship in order to get the secondary data is needed. The test statistic used is with a classic assumption test, test and test simultaneously with partial analysis of multiple regression and coefficient of determination.

Test results showed that the hypothesis partially variable capital expenditures have no effect against more financing budget (SILPA) because $t_{hitung} (0.137) < t_{tabel} (2.365)$ significance level $0.895 > 0.05$ then H_0 is accepted, the goods and services expenditure variables in partial influence on the rest of the more budget financing (SILPA) because $t_{hitung} (2.995) > t_{tabel} (2.365)$ significance level $0.05 > 0.020$ then H_0 is rejected. Simultaneously can be disimpulkan that the capital spending and shopping goods and services take effect simultaneously against the rest of the more budget financing (SILPA) because $F_{calculate} > F_{table} (12.197) > (5.32)$ then H_0 is rejected with a percentage of the influence of the variable X (capital expenditures, and shopping for goods and services) against the variable Y rest of more financing budget (SILPA) of 0.659 65.9% whereas or 34.1% influenced by other variables that are not examined by the researchers.

Keywords: Direct Expenditure (capital expenditures, and shopping for goods and services) and the rest of the More Budget Financing (SILPA).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, kasih dan karunianya-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini khususnya, kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua peneliti tercinta yang tulus memberikan doa, dorongan, motivasi, serta kasih sayang terhadap peneliti.
3. Dekan FISIP UIN SGD Bandung Bpk Dr. Sahya Anggara, Drs., Msi selaku pembimbing I skripsi sekaligus pembimbing akademik peneliti.
4. Ketua jurusan Administrasi Publik Bpk Khaerul Umam., S.Ip., M.Ag. yang senantiasa pembimbing dan memotivasi peneliti.
5. Bpk Drs. Heldi, M.Pd. selaku pembimbing 2 skripsi peneliti.

6. Bpk M. Sandy Martha, SE., M.M selaku Sekertaris Dekan FISIP yang selalu membimbing penulis hingga saat ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ikut senantiasa membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat yang selalu setia membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini diantaranya Anisa, Anne, Apsoh, Amel, Ayu, Ani.
9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2013 yang senantiasa berjuang bersama meraih cita dan cinta dalam pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Dan untuk doa yang tak pernah putus dari hamba Allah yang senantiasa mendoakan peneliti tanpa peneliti ketahui.

Akhir kata kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan peneliti yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sangat peneliti harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi selanjutnya di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, November 2017

peneliti

Anisa Nurul Aini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.5.1 Teoritis.....	10
1.5.2 Praktis.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Hipotesis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
2.2 Tinjauan Teoritis	18
2.2.1 Pengertian Administrasi Publik	18
2.2.2 Pengertian Administrasi Keuangan	19
2.2.3 Otonomi Daerah	20
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21

2.2.5 Belanja Langsung	23
2.2.5.1 Belanja Modal.....	24
2.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa.....	26
2.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	28
2.3 Hubungan Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.2.1 Populasi	31
3.2.2 Sampel	32
3.3 Jenis Data Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan data	34
3.5 Variabel Penelitian.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	37
3.6.1.1 Uji Normalis Residual	37
3.6.1.2 Multikolinearitas	38
3.6.1.3 Heteroskedastisitas	40
3.6.1.4 Autokolerasi.....	42
3.6.2 Pengujian Hipotesis.....	43
3.6.2.1 Analisis Regresi Berganda	43
3.6.2.2 Signifikansi Regresi Parsial (Uji-t).....	46

3.6.2.3 Signifikansi Regresi Simultan (Uji-f).....	49
3.6.2.4 Koefisien Dertiminasi.....	51
3.7 Lokasi Jadwal Penelitian	52



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum daerah Kabupaten Bandung	54
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Bandung	54
4.1.2	Wilayah Kabupaten Bandung	55
4.1.3	Visi Misi Kabupaten Bandung	56
4.1.3.1.	Visi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021	56
4.1.3.2.	Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.....	56
4.1.4.	Logo Kabupaten Bandung	57
4.2.	Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	58
4.2.1.	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	58
4.2.2.	Visi Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	60
4.2.2.1.	Visi	60
4.2.2.2.	Misi.....	60
4.2.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	60
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	65
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	68
4.3.1.1	Uji Normalitas	68
4.3.1.2	Uji Multikolinearitas	71
4.3.1.3	Uji heteroskedastisitas	72

4.3.1.4 Uji Autokolerasi	73
4.3.2 Pengujian Hipotesis.....	75
4.3.2.1 Analisis Regresi Berganda	75
4.3.2.2 Signifikansi Regresi Parsial (Uji-t).....	77
4.3.2.3 Signifikansi Regresi Berganda (Uji-f)	81
4.3.2.4 Koefisien Determinasi	83
4.4. Pembahasan	84
4.4.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung pada tahun 2006- 2015	84
4.4.2 Pengaruh Belanja Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.....	86
4.4.3 Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015	87
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	3
Tabel 1.2 Realisasi dan Target Belanja Modal.....	5
Tabel 1.3 Realisasi ndan Target Belanja Barang dan Jasa.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	36
Tabel 3.2 Realisasi dan Target Belanja Modal.....	36
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	37
Tabel 3.4 Klasifikasi Nilai Durbin Watson.....	42
Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Determinasi	52
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 4.1 Pengujian Normalitas Rasio <i>Skewness</i> dan Rasio <i>Kurtosis</i>	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test(K-S)</i>	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4.5 Nilai Uji Durbin Watson.....	73
Tabel 4.6 Klasifikasi Nilai <i>Durbin Watson</i>	74
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Belanja Modal)	79
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Belanja Barang dan Jasa).....	80
Tabel 4.10 Hasil Uji f.....	82
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian	14
Gambar 3.1 Kurva Durbin Watson.....	43
Gambar 3.2 Model Teoritis Analisis Regresi Berganda	44
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Variabel X_1	47
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Variabel X_2	48
Gambar 3.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 dengan Uji-f	50
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung	56
Gambar 4.2 Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) adalah dinas yang mempunyai peran sangat penting dalam mengelola pendapatan dan belanja di Kabupaten Bandung. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pendapatan daerah yang tinggi terutama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif efisien dan dapat dipertanggung jawabkan secara professional.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diatur secara hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 idealnya pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan timbal balik yang diharapkan dari kegiatan dan program, sehingga pendekatan kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah karena keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai serta kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (diatas bulan september) bisa diantisipasi, sehingga tidak mengurangi kemampuan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), untuk menyesuaikan belanja yang diakibatkan sempitnya waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan, karena kecendrungan daerah melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Jadi pemerintah daerah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif, efisien, untuk mencapai target yang ditetapkan karena jika anggaran tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .

Berikut ini ditampilkan data mengenai perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Kabupaten Bandung
Tahun 2006 – 2015

Tahun	Realisasi	Perkembangan
2006	225.993.089.522	-
2007	287.263.177.694	27
2008	155.509.599.178	-46
2009	317.829.389.787	104
2010	258.190.830.139	-19
2011	288.707.585.817	12
2012	309.929.497.577	7
2013	415.786.047.447	34
2014	611.954.333.929	47
2015	525.908.807.241	-14

**Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung (diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas selama 10 tahun terakhir SILPA pada Kabupaten Bandung mengalami fluktuatif. Terlihat di beberapa tahun terdapat nilai SILPA yang perkembangannya negatif, seperti pada tahun 2008 perkembangan SILPA adalah -46, tahun 2010 perkembangan SILPA adalah -19%, dan terakhir pada tahun 2015 perkembangan SILPA adalah -14%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang angkanya negatif perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Selain angka SILPA yang negatif terdapat pula realisasi SILPA yang cukup besar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 dimana total SILPA mencapai 611.954.333.929. Peneliti menduga besarnya SILPA yang terjadi pada tahun 2014 ini disebabkan oleh beberapa faktor 1) gagalnya menyerap alokasi belanja dengan baik dari beberapa dinas karena beberapa program yang tidak terealisasikan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, 2) kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja langsung, 3) sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut.

Sumbangan terbesar SILPA Kabupaten Bandung disini adalah dari banyaknya sisa belanja langsung yang realisasinya tidak mencapai target anggaran. Besar kecilnya belanja langsung setiap tahunnya juga tergantung pada besar kecilnya realisasi dari belanja modal dan belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari belanja langsung.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah alokasi belanja modal Kabupaten Bandung dari tahun 2006 hingga 2015.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Target		Ket
				Min	Mak	
2006	20.396.785.000	16.016.365.652	78,52	80	100	Tidak Tercapai
2007	453.953.785.125	370.894.040.025	81,7	80	100	Tercapai
2008	218.790.299.248	180.480.211.408	82,49	80	100	Tercapai
2009	195.100.983.439	148.925.370.067	76,33	80	100	Tidak Tercapai
2010	335.483.606.665	198.090.778.260	59,04	80	100	Tidak Tercapai
2011	285.836.190.927	172.470.535.785	60,33	80	100	Tidak Tercapai
2012	564.591.683.234	489.588.416.448	86,71	80	100	Tercapai
2013	508.221.239.060	449.078.124.664	88,36	80	100	Tercapai
2014	643.721.820.957	473.371.826.705	73,53	80	100	Tidak Tercapai
2015	806.526.950.510	708.464.526.697	87,84	80	100	Tercapai

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, realisasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten Bandung selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif, dari data diatas realisasi belanja modal pada tahun 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015 cenderung tercapai karena jumlah realisasi selalu melebihi target minimum yang telah ditentukan oleh Kabupaten Bandung. Sedangkan belanja modal berada dibawah target minimal yaitu pada tahun 2006 sebesar 78,52%, tahun 2009 sebesar 76,33%, tahun 2010 sebesar 59,04%, tahun 2011 sebesar 60,33% dan tahun 2014 sebesar 73,53%.

Peneliti menduga faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya belanja modal dari target yang telah direncanakan adalah tidak terlaksananya program yang ditujukan untuk pelayanan publik seperti pembangunan infrastuktur sehingga anggaran menumpuk di akhir tahun. Selain belanja modal yang menjadi

bagian dari belanja langsung, belanja barang dan jasa juga merupakan bagian dari belanja langsung.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah alokasi belanja barang dan jasa Kabupaten Bandung dari tahun 2006 hingga 2015.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Target		Ket
				Min	Mak	
2006	16.734.979.000	14.541.395.611	86,89	80	100	Tercapai
2007	218.974.899.572	191.372.402.217	87,39	80	100	Tercapai
2008	248.800.943.843	231.436.761.163	93,02	80	100	Tercapai
2009	330.536.416.695	314.029.971.062	95,00	80	100	Tercapai
2010	434.749.404.267	410.907.973.144	94,51	80	100	Tercapai
2011	578.120.015.379	558.032.627.779	96,52	80	100	Tercapai
2012	512.732.044.950	493.670.423.251	96,28	80	100	Tercapai
2013	693.878.967.362	666.777.387.019	96,09	80	100	Tercapai
2014	1.062.274.310.541	939.501.476.184	88,44	80	100	Tercapai
2015	1.487.193.566.036	1.328.807.221.201	89,34	80	100	Tercapai

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, target dan realisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Bandung tahun 2006-2015. Belanja barang dan jasa mengalami fluktuatif. Diketahui pada tahun 2006 target belanja barang dan jasa yaitu 16.734.979.000 dan terealisasi sebesar 14.541.395.611. Diketahui pada tahun

2007 target belanja barang dan jasa yaitu 218.974.899.572 dan terealisasi sebesar 191.372.402.217. Diketahui pada tahun 2008 target belanja barang dan jasa yaitu 248.800.943.843 dan terealisasi sebesar 231.436.761.163. Diketahui pada tahun 2009 target belanja barang dan jasa yaitu 330.536.416.695 dan terealisasi sebesar 314.029.971.062. Diketahui pada tahun 2010 target belanja barang dan jasa yaitu 434.749.404.267 dan terealisasi sebesar 410.907.973.144. Diketahui pada tahun 2011 target belanja barang dan jasa yaitu 578.120.015.379 dan terealisasi sebesar 558.032.627.779. Diketahui pada tahun 2012 target belanja barang dan jasa yaitu 512.732.044.950 dan terealisasi sebesar 493.670.423.251. Diketahui pada tahun 2013 target belanja barang dan jasa yaitu 693.878.967.362 dan terealisasi sebesar 666.777.387.019. Diketahui pada tahun 2014 target belanja barang dan jasa yaitu 1.062.274.310.541 dan terealisasi sebesar 939.501.476.184. Dan terakhir diketahui pada tahun 2015 target belanja barang dan jasa yaitu 1.487.193.566.036 dan terealisasi sebesar 1.328.807.221.201.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Purnomo, 2009:40).

Besaran SILPA di akhir tahun anggaran menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tersebut. Selain itu besarnya SILPA diakhir tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tidak

memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran. Akibatnya, banyak dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan publik tidak tersalurkan.

Masih rendahnya daya serap anggaran belanja dan tingginya SILPA yang terjadi di Kabupaten Bandung dalam APBD menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karena APBD yang dikelola belum optimal seperti harapan publik. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang Belanja Langsung Kabupaten Bandung terutama mengenai pengaruhnya terhadap SILPA dan bermaksud menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015*”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan maksud dari penelitian ini diantaranya :

1. Terdapat beberapa tahun dimana perkembangan SILPAnya negatif yaitu pada tahun 2008, 2010 dan 2015
2. Dalam menentukan target belanja langsung selalu ditetapkan target yang sangat tinggi sehingga sulit terealisasikan. Terbukti pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2014 tidak terealisasi karena tidak mencapai 85%.
3. Realisasi dari belanja modal di beberapa tahun terakhir sangat rendah bahkan ada yang hanya mencapai angka 59%

4. SILPA ditahun 2014 yang mencapai 611.954.333.929 merupakan nilai SILPA yang paling tinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir berasal dari anggaran yang tidak terserap dari beberapa SKPD
5. Tidak terserapnya anggaran untuk pembangunan dalam belanja bangunan dan gedung menyebabkan belanja modal ikut berpengaruh
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan belanja tanah yang merupakan bagian dari belanja modal ikut berpengaruh

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok dari permasalahan adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015 ?
2. Seberapa besar pengaruh Belanja Barang terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015 ?
3. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015 ?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Barang terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2015

1.5.Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain :

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang Belanja Langsung dan SILPA serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Langsung, terhadap SILPA.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk melatih dan membangun pola pikir ilmiah serta menginterpretasikannya ke dalam suatu karya ilmiah tertulis dan mencoba menerapkan serta membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realita yang ada, sehingga dapat menambah wawasan dan cara berpikir penulis. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi PEMDA Kabupaten Bandung

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sebuah negara pasti memiliki pemerintahan di dalamnya. Salah satu fungsi dari sebuah pemerintahan ialah mengatur segala urusan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan pemerintahan erat kaitannya dengan kegiatan administrasi, dimana administrasi negara memiliki peranan penting dalam jalannya roda pemerintahan.

Setiap pemerintah memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam jalannya roda pemerintahan. Dimana salah satu didalamnya ialah kebutuhan akan belanja pemerintahan seperti belanja langsung. Salah satu sumber pendanaan untuk alokasi belanja langsung penyedia berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung.

Menurut Mursyidi (2013:297) belanja langsung belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja pegawai antara lain untuk menampung horarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik salah satunya bisa dilihat dari sisa anggaran tahun tersebut, mengapa demikian karena jika sisa di akhir tahun besar maka belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat pun belum maksimal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. (Siregar, 2015:32)

SILPA mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan.

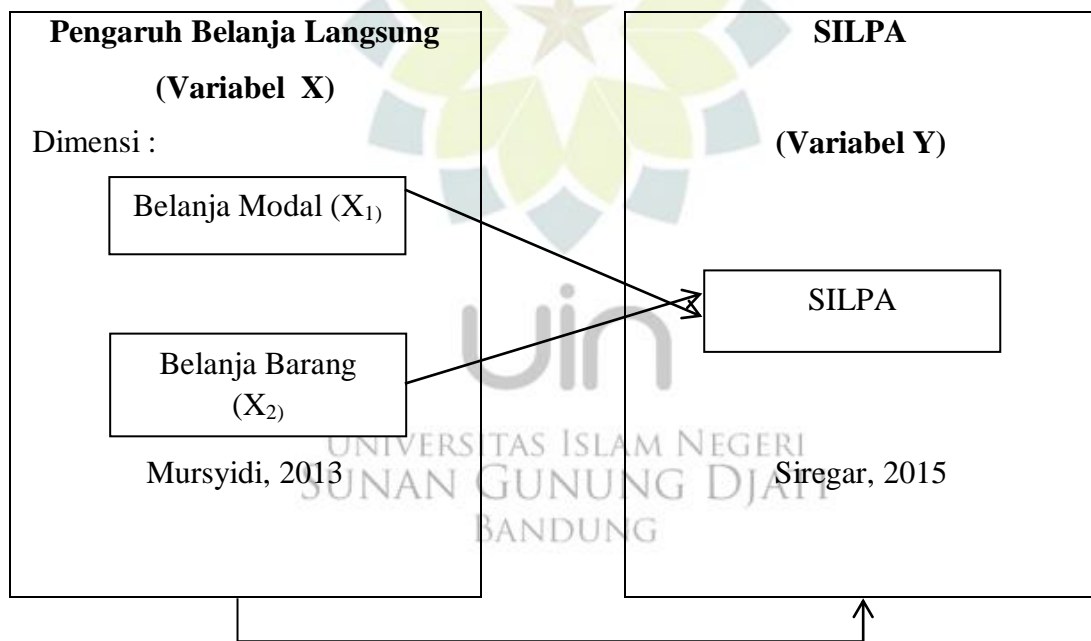
SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka ada pembiayaan netto setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya

penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan. (Andalia, 2012)

Struktur APBD yang baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapatnya SILPA, apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan lagi “hangus”, tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA). (Mahmudi 2010: 4-5)

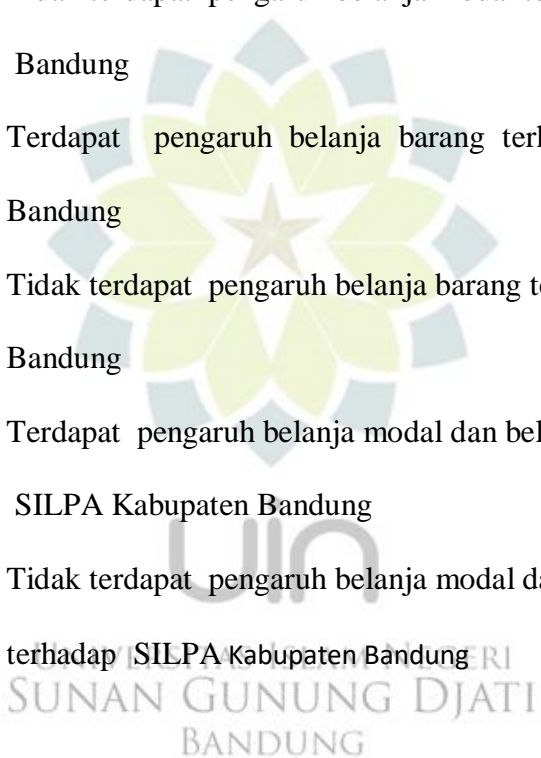
Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan menjadi model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Model Penelitian

1.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- 1 Ha : Terdapat pengaruh belanja modal terhadap SILPA Kabupaten Bandung
Ho : Tidak terdapat pengaruh belanja modal terhadap SILPA Kabupaten Bandung
 - 2 Ha : Terdapat pengaruh belanja barang terhadap SILPA Kabupaten Bandung
Ho : Tidak terdapat pengaruh belanja barang terhadap SILPA Kabupaten Bandung
 - 3 Ha : Terdapat pengaruh belanja modal dan belanja barang terhadap SILPA Kabupaten Bandung
Ho : Tidak terdapat pengaruh belanja modal dan belanja barang terhadap SILPA Kabupaten Bandung
- 
- UIN
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peneliti Sebelumnya

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut disajikan tabel mengenai penelitian sebelumnya tentang Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Analisa Perbandingan Hasil	
				Perbedaan	Persamaan
1.	Siti Fatmawati (2013)	Pengaruh Belanja Langsung terhadap SILPA (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	Hasil penelitian ini menunjukkan angka sebesar 0,002, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap SILPA.	Perbedaan terletak pada waktu penelitian, dimana peneliti sebelumnya pada tahun 2013 sedangkan peneliti pada tahun 2017	Persamaan terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yaitu Belanja langsung dan SILPA
2.	Ni Putu Dwi Eka (2014)	Pengaruh Belanja Modal terhadap silpa (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SILPA dengan nilai tingkat signifikansi untuk variabel Belanja Modal 0,006 lebih kecil	Perbedaan terletak pada variabel bebasnya yaitu belanja modal, sedangkan peneliti menggunakan variabel bebas belanja langsung	Persamaan terletak pada Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Analisa Perbandingan Hasil	
				Perbedaan	Persamaan
			dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,033.		
3	Iswahyudin (2015)	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA dengan hasil perhitungan $F_{hitung} = 15,239$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$	Obyek penelitian sebelumnya berada di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sedangkan peneliti menggunakan obyek di Kabupaten Bandung.	Persamaan terletak pada variabel bebasnya yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa yang merupakan X_1 dan X_2 dari Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti.

Berdasarkan tabel 2.1 mengenai penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Siti Fatmawati 2013 yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung terhadap SILPA (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)” terdapat persamaan dengan peneliti yaitu variabel X : Belanja Langsung dan variabel Y : SILPA. Hasil dari peneliti sebelumnya menunjukkan Belanja langsung berpengaruh signifikan positif terhadap SILPA.

Kedua, skripsi yang ditulis Ni Putu Dwi Eka 2014 yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)” bahwa persamaan dengan judul yang peneliti ambil yaitu X_1 : Belanja Modal dan Y: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Belanja modal memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap SILPA dengan nilai tingkat signifikansi untuk variabel Belanja Modal 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,033.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Iswahyudin 2015 yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah)”. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu X_1 : Belanja Modal, X_2 : Belanja Barang dan jasa dan Y : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA dengan hasil perhitungan $F_{hitung} = 15,239$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$.

Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang di uji oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat kesamaan maupun perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi adalah suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan yang mencakup semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi.

Dengan administrasi kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan administrasi negara.

Menurut Sondang P. Siagian (2004;2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie, 1999 : 18).

Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004: 3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Dimock dan Fox dikutip oleh (Anggara, 2012 : 46) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa defenisi di atas tentang administrasi publik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah sekelompok orang yang melakukan penataan kegiatan dalam usaha yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2. Pengertian Administrasi Keuangan

Pengertian administrasi keuangan yang dikemukakan oleh Mamesah (1995:14) adalah “Rangkaian kegiatan dalam mengelola keuangan secara tertib, sah , hemat, berdayaguna dan berhasil guna mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumber serta pembiayaan-pembiayaannya.

Administrasi keuangan yang dikemukakan oleh P. Siagian (1995:14) adalah “Suatu kenyataan bahwa biaya yang tersedia bagi suatu negara yang sedang

giat melakukan pembangunan seperti Indonesia selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang perlu dibiayai”.

Pengertian administrasi keuangan menurut Syarifudin (2005:89) adalah : “Usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para pejabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian

administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai penelolaan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dan administrasi keuangan merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna.

2.2.3. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mengatur segala urusan pemerintahannya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. Secara garis besar pembentukan pemerintahan daerah ini bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (Widjadja, 2002 :13)

Menurut Rosidin (2010 : 85) Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”.

Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ialah hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus segala bentuk kegiatan dan kebutuhan daerahnya dalam rangka kemandirian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat

dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004 : 223).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud, Mamesah dikutip oleh (Halim, 2014 : 21).

Menurut Siregar, (2015 : 29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode. Struktur utama APBD meliputi :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah.

Belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung, termasuk belanja pegawai, hibah .
- b. Belanja Langsung, termasuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa.

2.2.5. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi (Mursyidi, 2013). Belanja pelayanan langsung adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja langsung merupakan belanja yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang mempengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Pemerintah diminta lebih fokus meningkatkan belanja langsung (*direct spending*), baik melalui peningkatan daya beli konsumen maupun pembangunan infrastruktur.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010) yang mengemukakan bahwa belanja langsung yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya suatu

kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Contohnya, biaya alat tulis kantor, biaya bahan/material, pembelian peralatan, mesin, kendaraan.

Untuk pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

2.2.5.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (Mursyidi, 2013:300).

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal dibagi dalam 5 kategori, diantaranya :

1) Belanja Modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuat sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan / pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2.5.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. Berikut klasifikasinya :

- 1) Belanja bahan pakai habis
- 2) Belanja bahan/material
- 3) Belanja jasa kantor
- 4) Belanja premi asuransi
- 5) Belanja perawatan kendaraan bermotor
- 6) Belanja cetak dan pengadaan
- 7) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir

- 8) Belanja sewa sarana mobilitas
- 9) Belanja sewa alat berat
- 10) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 11) Belanja makanan dan minuman
- 12) Belanja pakaian dinas dan atributnya
- 13) Belanja pakaian kerja
- 14) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
- 15) Belanja perjalanan dinas
- 16) Belanja perjalanan pindah tugas
- 17) Belanja pemulangan pegawai
- 18) Belanja pemeliharaan
- 19) Belanja jasa konsultasi
- 20) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
- 21) Belanja barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
- 22) Belanja beasiswa pendidikan PNS
- 23) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS
- 24) Belanja honorarium non pegawai
- 25) Belanja honorarium PNS
- 26) Belanja honorarium non PNS
- 27) Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

2.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja,

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. (Siregar, 2015:32).

SILPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa SILPA adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan Mahmudi (2010:4) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya.

SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balitbang Provinsi NTT, 2008).

Ardhani (2011:27) menyatakan bahwa selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus

terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.3. Hubungan Antara Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Belanja langsung adalah belanja yang mempengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Pemerintah diminta lebih fokus meningkatkan belanja langsung (direct spending), baik melalui peningkatan daya beli konsumen maupun pembangunan infrastruktur. Belanja langsung diyakini mempunyai multiplier effect lebih dahsyat dalam penciptaan lapangan kerja dibanding insentif fiskal yang hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja (Sari, 2010)

SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Kusnandar dan Siswantoro : 2011)

SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT : 2008). Namun menurut Kumorotomo (2010), besarnya SILPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

SILPA yang tinggi dapat menunjukkan kurangnya kinerja aparat pemerintah dalam mengelola penyusunan anggaran apabila program-program pemerintah banyak yang belum terealisasi. Namun SILPA juga dapat menunjukkan kinerja aparat pemerintah yang baik jika program-program pemerintah sudah terealisasi dengan baik.

SILPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran digunakan juga sebagai salah satu sumber pendanaan untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dalam membiayai pembangunan infrastruktur, memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Anggara, 2015 : 14).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif / hubungan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antarvariabel atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. (Anggara, 2015 : 21).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya berupa angka yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Anggara, 2015:96) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Jadi populasi bukan hanya orang, melainkan obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar yang ada pada obyek / subyek yang dipelajari, melainkan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian subjek dalam populasi yang diteliti, yang secara representatif dapat mewakili populasinya (Anggara, 2015:96). Pemilihan sampel dapat dilakukan apabila populasi terlalu besar sehingga sulit dijangkau oleh peneliti, sulit dalam mengolah data, biaya yang sangat besar dan waktu yang terlalu banyak (Silalahi, 2009 : 6).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. (Anggara, 2015 : 98)

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. (Sugiyono, 2014 : 96).

Pada saat memilih sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*, maka peneliti harus benar-benar memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan,

dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

3.3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Anggara, 2015 : 30).

Untuk keperluan analisis data, maka peneliti memerlukan data pendukung yang berasal dari dalam dan luar wilayah penelitian. Karena itu, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Darmawan, 2013 :13). Dalam hal ini, data yang diperoleh adalah hasil observasi dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2013 : 13). Data sekunder penelitian ini adalah berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012 : 156) :

1. Studi Kepustakaan yaitu mencari data dengan mempelajari referensi, buku-buku, praturan-praturan tertulis serta referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan yaitu usaha pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara permintaan data kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

3.5. Variabel Penelitian

Menurut Kerlinger dikutip dalam (Anggara, 2015 : 75) variabel adalah konstruk (*construts*) atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Kerlinger juga menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different value*). Dengan demikian, variabel merupakan suatu yang bervariasi.

Secara teoritis menurut Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2014 : 38) variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Pengaruh Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015”, maka penulis mengungkapkan beberapa pengertian variabel yang dioperasionalkan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sering disebut juga variabel *output*, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014 : 40). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen sering disebut juga sebagai variabel *stimulus*, *preditor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014 : 39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

Berikut adalah rincian mengenai variabel Y yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Siregar : 2015) yang diuraikan dalam data keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2015

Tahun	Realisasi	Perkembangan %
2006	225.993.089.522	-
2007	187.263.177.694	-17
2008	155.509.599.178	-17
2009	317.829.389.787	104
2010	258.190.830.139	-19
2011	288.707.585.817	12
2012	317.829.389.787	10
2013	155.509.599.178	-51
2014	187.263.177.694	20
2015	525.908.807.241	181

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Berikut adalah rincian dimensi-dimensi dari variabel X yaitu Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa yang diuraikan dalam data keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2006	20.396.785.000	16.016.365.652	78,52
2007	453.953.785.125	370.894.040.025	81,70
2008	218.790.299.248	180.480.211.408	82,49
2009	195.100.983.439	148.925.370.067	76,33
2010	335.483.606.665	198.090.778.260	59,04
2011	285.836.190.927	172.470.535.785	60,33
2012	564.591.683.234	489.588.416.448	86,71
2013	508.221.239.060	449.078.124.664	88,36
2014	643.721.820.957	473.371.826.705	73,53
2015	806.526.950.510	708.464.526.697	87,84

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2006	16.734.979.000	14.541.395.611	86,89
2007	218.974.899.572	191.372.402.217	87,39
2008	248.800.943.843	231.436.761.163	93,02
2009	330.536.416.695	314.029.971.062	95,00
2010	434.749.404.267	410.907.973.144	94,51
2011	578.120.015.379	558.032.627.779	96,52
2012	512.732.044.950	493.670.423.251	96,28
2013	693.878.967.362	666.777.387.019	96,09
2014	1.062.274.310.541	939.501.476.184	88,44
2015	1.487.193.566.036	1.328.807.221.201	89,34

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. (Silalahi 2009 : 332). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

3.6.1.1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized*.

Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut adalah normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada output hasil regresi.

Langkah uji normalitas residual adalah sebagai berikut :

- 1) Buka program SPSS dengan klik Start >> All Programs >> IBM SPSS Statistic >> IBM SPSS Statistic 22.
- 2) Pada halaman SPSS 22 yang terbuka, klik Variabel View, maka akan terbuka halaman Variabel View.
- 3) Selanjutnya membuat variabel. Pada kolom Name, baris pertama ketik X; pada Label ketik Belanja Langsung. Pada kolom baris kedua ketik Y; pada Label ketik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
- 4) Setelah itu masuk ke halaman Data View dengan klik Data View, maka akan terbuka Data View. Selanjutnya isikan data.
- 5) Selanjutnya klik Analyze >> Regression >> Linear. Lalu akan terbuka kotak dialog.
- 6) Beri nama centang pada Normal Probability Plot, kemudian klik tombol Continue, akan kembali ke kotak dialog sebelumnya.
- 7) Klik tombol OK. Hasil grafik normal *P-P Plot* akan keluar.

3.6.1.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan / pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala *Multikolinieritas*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 cara, yaitu melihat VIF dan melihat nilai *tolerance* :

- 1) Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
- 2) Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.
- 3) Nilai *tolerance* (a) dan *variance inflation factor* (VIF) dapat dicari dengan, sebagai berikut :
 - a. Besar nilai *tolerance* (a): $a = 1 / VIF$
 - b. Besar nilai *variance inflation factor* (VIF): $VIF = 1 / a$
 - c. Variabel bebas mengalami *multikolinieritas* jika a hitung VIF.
 - d. Variabel bebas tidak mengalami *multikolinieritas* jika a hitung $> a$ dan $VIF \text{ hitung} < VIF$.

Langkah-langkah uji *multikolinieritas* adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama klik menu Analyze.
- 2) Selanjutnya pilih submenu regresi, klik linier.
- 3) Klik Box dependent: variabel terikat (Y)
- 4) Klik Box independent: variabel bebas (X)
- 5) Setelah itu klik method, pilih enter

- 6) Lalu Klik tombol statistic, akan muncul linier regression statistic: nonaktifkan estimates dan model fit, aktifkan: covariance matrix dan collinieritas diagnostics.
- 7) Klik continue
- 8) Klik OK.

Analisis Output:

Melihat besaran koefisien korelasi antar variabel bebas, terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 0,142 jauh di bawah 0,60. Disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi *multikolinieritas*.

Menggunakan besaran *tolerance* (a) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan $\alpha/\textit{tolerance} = 10\%$ atau 0,10 maka $VIF = 10$. Dari hasil *output* VIF hitung dari kedua variabel = $1,021 < VIF = 10$ dan semua *tolerance* variabel bebas $0,980 = 98\%$ diatas 10%, dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi *multikolinieritas*.

3.6.1.3. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heterokedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Hal seperti itu juga disebut sebagai *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas* atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya *heterokedastisitas* dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* melalui nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan *residual error* (ZPRED) dan statistika (Restiyana, 2011 : 38).

Pengambilan keputusan dalam uji *heterokedastisitas* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi *heterokedastisitas*.
- 2) Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heterokedastisitas*.
- 3) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi *heterokedastisitas*
- 4) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi *heterokedastisitas*.

Langkah-langkah uji *heteroskedastisitas* adalah sebagai berikut :

- 1) Klik Analyze >> Regression >> Linear, selanjutnya kotak dialog Linear regresi akan terbuka.
- 2) Masukkan variabel SILPA ke kotak Dependen, kemudian variabel Belanja Langsung ke kotak Independen. kemudian klik tombol Statistic.
- 3) Klik *SRESID (studentized residual) dan masukan ke kotak Y, kemudian klik *ZPRED (standaridized predicted value) dan masukan ke kotak X. Kemudian klik tombol Continue maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya.
- 4) Klik tombol OK. Maka hasil output grafik *Scatterplot* akan keluar.

3.6.1.4. Uji Autokorelasi

Uji *Autokorelasi* digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya *autokorelasi*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan, Uji *Durbin-Watson* (*DW Test*) dengan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta = 0$ (baca: hipotesis nolnya adalah tidak ada *autokorelasi*)

$H_a: \beta \neq 0$ (baca: hipotesis alternatifnya adalah ada *autokorelasi*)

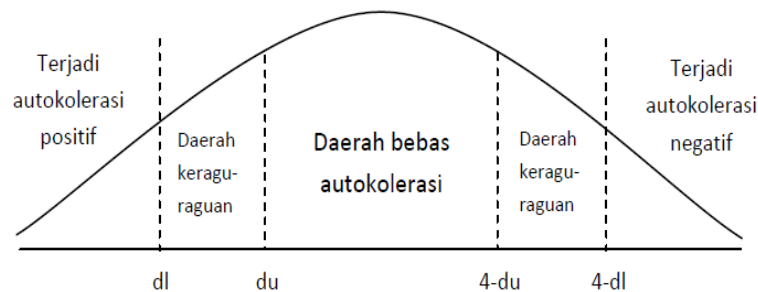
Keputusan ada tidaknya *autokorelasi* adalah sebagai berikut :

- 1) Bila nilai DW berada di antara d_U sampai dengan $4 - d_U$ maka koefisien *autokorelasi* sama dengan nol. Artinya, tidak ada *autokorelasi*.
- 2) Bila nilai DW lebih kecil daripada d_L , koefisien *autokorelasi* lebih besar daripada nol. Artinya ada *autokorelasi* positif.
- 3) Bila nilai DW terletak di antara d_L dan d_U , maka tidak dapat disimpulkan.
- 4) Bila nilai DW lebih besar daripada $4 - d_L$, koefisien *autokorelasi* lebih besar daripada nol. Artinya ada *autokorelasi* negatif.
- 5) Bila nilai DW terletak di antara $4 - d_U$ dan $4 - d_L$, maka tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.4
Klasifikasi Nilai Durbin Waston Untuk Autokorelasi

Nilai	Keterangan
$<1,10$	Ada autokorelasi
$1,10 - 1,54$	Tidak ada kesimpulan
$1,55 - 2,45$	Tidak ada autokorelasi
$2,46 - 2,90$	Tidak ada kesimpulan
$>2,91$	Ada autokorelasi

(Basyirun, 2011 : 41)



(Gurajati, 2011 : 41)

Gambar 3.1
Kurva Durbin Watson

Langkah-langkah uji *autokorelasi* adalah sebagai berikut :

- 1) Klik Analyze >> Regression >> Linear, selanjutnya kotak dialog Linear regresi akan terbuka.
- 2) Masukkan variabel SILPA ke kotak Dependen, kemudian variabel Belanja Langsung ke kotak Independen. kemudian klik tombol Statistic.
- 3) Berikan tanda centang pada Durbin-Watson, kemudian klik Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya.
- 4) Klik OK. Maka hasil output Model Summary akan keluar.

3.6.2. Pengujian Hipotesis

3.6.2.1. Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi berganda adalah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen (*criterion*) tunggal dengan beberapa variabel-variabel independen (*predictor*) (Silalahi, 2009 : 430).

Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k + e$$

Keterangan :

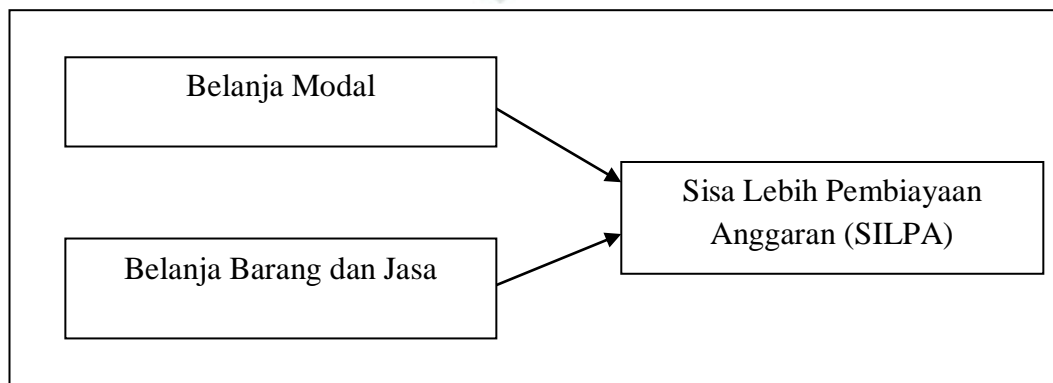
Y = Variabel terikat

X_1, X_2, \dots, X_k = Variabel Independen.

b_0, b_1, \dots, b_k = Koefisien

e = Variabel Error.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan tiga prediktor, karena terdapat tiga variabel independen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui persamaan regresi hubungan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung.



(Silalahi, 2012 : 431)

Gambar 3.2
Model Teoritis Analisis Regresi Berganda (Tiga Prediktor)

Langkah-langkah analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

- 1) Klik Analyze >> Regression >> Linear.
- 2) Klik variabel terikat >> Pindahkan ke kotak Dependent.

- 3) Klik variabel bebas >> Pindahkan ke kotak Independent(s).
- 4) Pada Method, pastikan dipilih Enter (untuk Regresi Berganda Standar).
- 5) Klik tombol Statistics, lalu lakukan :
- 6) Ceklis Estimates, Model fit, Descriptives, dan Collinearity diagnostics.
- 7) Pada bagian Residual, ceklis Casewise diagnostics dan Outliers outside 3 standard deviations.
- 8) Klik Continue.
- 9) Klik tombol Options. Pada bagian Missing Values ceklis Exclude cases pairwise.
- 10) Klik tombol Plots, lakukan :
- 11) Klik *ZRESID dan tombol panah untuk memindahkannya ke kotak y-axis.
- 12) Klik *ZPRED dan tombol panah untuk memindahkannya ke kotak x-axis.
- 13) Klik Next
- 14) Klik *SRESID dan tombol panah untuk memindahkannya ke kotak y-axis (untuk melihat homoskedastisitas)
- 15) Klik *ZPRED dan tombol panah untuk memindahkannya ke kotak x-axis (untuk melihat homoskedastisitas)
- 16) Pada bagian Standardized Residual Plots, ceklis pilihan Normal probability plot.
- 17) Klik *Continue*.
- 18) Klik tombol *Save*.
- 19) Pada bagian *Predicted Values*, ceklis *Unstandardized*, *Standardized*, *Adjusted*

20) Pada bagian *Residuals*, ceklis *Standardized*, *Deleted*, dan *Studentized deleted*.

21) Pada bagian *Distances*, ceklis *Mahalanobis*, *Cook's*, dan *Leverage values*.

22) Pada bagian *Influence Statistics*, ceklis *Standardized dfBeta(s)* dan *Standardized DiFit*

23) Klik Continue.

24) Klik OK.

3.6.2.2. Signifikansi Regresi Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya atau pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi setiap variabel bebas (independen) dalam mempengaruhi variabel terikat.

Pada penelitian ini, uji-t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen Belanja Langsung (X) secara parsial berpengaruh terhadap SILPA (Y).

1) Menguji pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA.

a. Formula hipotesisnya

$H_0 : \beta_1=0$: Berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

$H_1 : \beta_1>0$: Berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

b. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dengan derajat kebebasan $df \ n-k = 10-4 = 6$, dengan uji sisi kanan maka diperoleh t_{tabel}

c. Kriteria pengujian :

H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

d. Perhitungan :

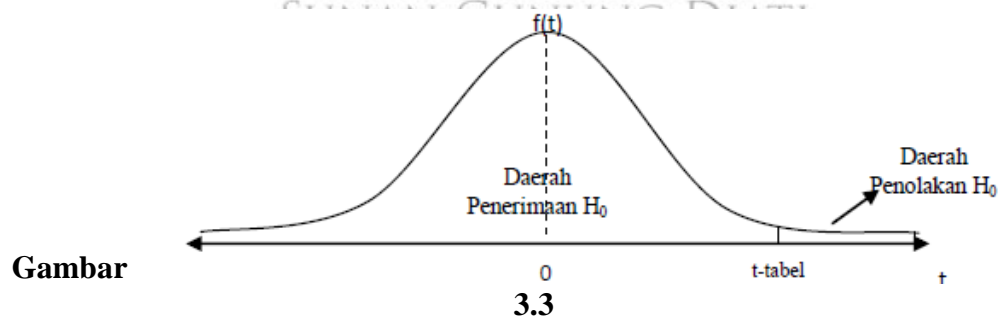
Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil t_{hitung} .

a. Kesimpulan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, yang berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti Belanja Modal berpengaruh positif secara parsial terhadap SILPA

Daerah penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat pada gambar 3.3 adalah sebagai berikut (Nata Wirawan, 2002 : 81).



Gambar

3.3

**Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0
(Variabel Belanja Modal)**

1. Menguji pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA.

a. Formula hipotesisnya

$H_0 : \beta_1=0$: Berarti Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA.

$H_1 : \beta_1>0$: Berarti Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA.

b. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dengan derajat kebebasan $n-k-1 = 10-4-1 = 7$, dengan uji sisi kanan maka diperoleh t_{tabel}

c. Kriteria pengujian :

H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

d. Perhitungan :

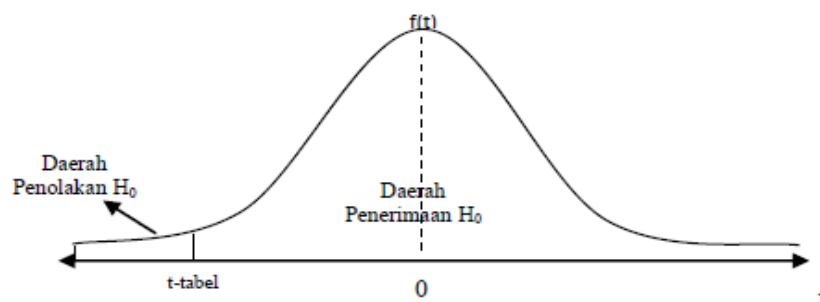
Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil t_{hitung} .

e. Kesimpulan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, yang berarti Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif secara parsial terhadap SILPA.

Daerah penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat pada gambar 3.4 adalah sebagai berikut (Nata Wirawan, 2002 : 81) :



Gambar 3.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0
(Variabel Belanja Barang dan Jasa)

Adapun prosedurnya dengan menggunakan SPSS 22 yaitu sebagai berikut :

- 1) Buka data yang akan diuji.
- 2) Pilih menu SPSS 22, klik Analyze >> Regresion pada submenu >> Klik Linear.
- 3) Pada kotak Dependent, isikan variabel Y (SILPA) dan pada kotak independen isikan variabel X1, X2 (Belanja Modal, belanja Barang dan Jasa)
- 4) Selanjutnya abaikan yang lain, kemudian klik OK.
- 5) Tampilkan hasil output SPS

3.6.2.3. Signifikansi Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik *inferensial*. Pengujian hipotesis yang pertama adalah menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel-variabel bebas berupa Belanja modal, belanja barang dan jasa secara bersama-sama mempunyai hubungan *linear* dan dapat menjelaskan variabel terikat yakni SILPA.

Maka dari itu, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Belanja Langsung (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen SILPA (Y).

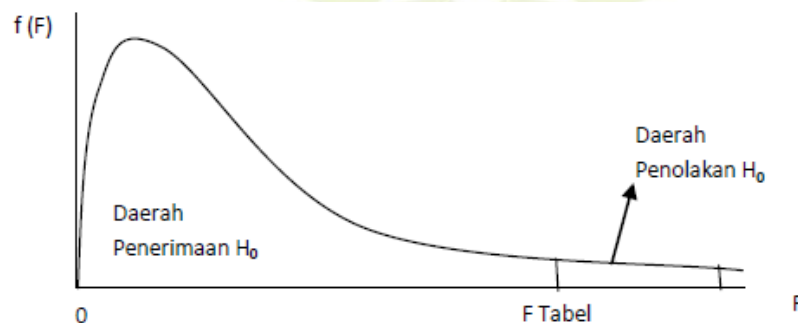
Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan pendekatan pengujian tingkat penting (*test of significance*) yaitu suatu pengujian atas statistik uji (*estimator*) yaitu keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis (H₀) atas dasar nilai statistik uji yang diperoleh dari data yang dimiliki.

Pengujian hipotesis ini menggunakan statistik uji F melalui pendekatan *analysis of variance* (anova). Uji F dengan pendekatan anova ini bertujuan menguji apakah ada pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Hipotesis Uji :

H₀ : $\beta_1=0$: artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat ($i = 1,2$).

H₁ : Minimal satu atau $\beta_i \neq 0$: artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat ($i = 1,2$).

Daerah penerimaan dan penolakan H₀ dapat dilihat pada gambar 3.5 adalah sebagai berikut (Nata Wirawan, 2002 : 82) :



Gambar 3.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan H₀ dengan Uji F

Adapun prosedurnya dengan menggunakan SPSS 22 yaitu sebagai berikut :

- 1) Buka data yang akan diuji.
- 2) Pilih menu SPSS 22, klik Analyze >> Regresion pada submenu >> Klik Linear.
- 3) Pada kotak Dependent, isikan variabel Y (SILPA) dan pada kotak independen isikan variabel X₁, X₂ (Belanja modal, belanja barang dan

jasa)

- 4) Selanjutnya abaikan yang lain, kemudian klik OK.
- 5) Tampilkan hasil output SPSS.

3.6.2.4. Koefisien Determinasi (Kd)

Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (*dependen*) ditentukan oleh perubahan dalam varian lain (*independen*). Koefisien korelasi (untuk beberapa uji *korelasi*) digunakan untuk menentukan koefisien determinasi. Dalam konteks ini, koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien *korelasi* (misalnya, r^2).

Koefisien determinasi adalah untuk menunjukkan seberapa pengaruh belanja modal, belanja barang dan jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung.

Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%) sehingga harus dikalikan dengan 100%. Tepatnya jika koefisien *korelasi* antara variabel X dan Y adalah 1.00, koefisien determinasi adalah 12 atau $1 \times 100\% = 100\%$. Artinya, 100% dari variasi perubahan dalam variabel Y disebabkan oleh variasi perubahan dalam variabel X. Bisa juga dinyatakan bahwa 100% *error* atau kesalahan dalam peramalan satu variabel dengan pengetahuan tentang yang lain dapat dihitung. Makin kuat koefisien *korelasi* semakin besar koefisien determinasi, atau sebaliknya. Perhitungan nilai koefisien determinasi ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determinant*), yaitu variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama.

r^2 = Nilai koefisien korelasi.

Tabel 3.5
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi

0% < KD < 100%	Tingkat Hubungan
81% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80 %	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah Tapi Pasti
0% - 4%	Rendah atau Lemah Sekali

Sugiyono (2001 : 183)

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Raya Soreang KM. 17 Kabupaten Bandung.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Tabel 3.6
Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																															
Pembuatan Proposal Penelitian					■																											
Seminar Proposal Penelitian																																
Revisi Proposal dan Pengolahan Data													■																			
Bimbingan Skripsi																					■											
Sidang Skripsi																																



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bandung

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung berdiri pada tanggal 20 April 1641 M, bertepatan dengan keluarnya “Serat Piyagem” dari Sultan Ageng Mataram yang menyebutkan ping songo tahun Alif bulan Muharam. Pada saat itu pula Tumenggung Wiraangun-angun (1641-1681) sebagai Bupati Bandung Pertama. Cikal bakal Kabupaten Bandung semula berada didaerah Karapiak atau Bojongasih di sungai Cikapundung dekat muara, nama Karapiak kemudian menjadi Citeureup, sebagai ibu kota Kabupaten Bandung yang berpenduduk 200 jiwa. Sultan Agung Mataram, kemudian meminta agar Timbangaten salah satu Kabupaten di Priangan di bawah pemerintah Bupati R. Ardi Kusuma mengirimkan 800 penduduknya untuk mengisi Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten baru. Ditambah 200 penduduk lama Karapiak, maka didirikanlah bakal ibukota Kabupaten Bandung di tepi muara sungai Cikapundung yang kemudian diberi nama Citeureup.

Hari jadi Kabupaten Bandung adalah pada tanggal 20 April 1641. Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram. Sistem pemerintahan Kabupaten Bandung mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (dari masa ke masa) yang disusun oleh R.H Lily Sumantry, H. Sulaeman Anggapraja dan H.

Ahmad Syafei, membagi masa Pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing–masing:

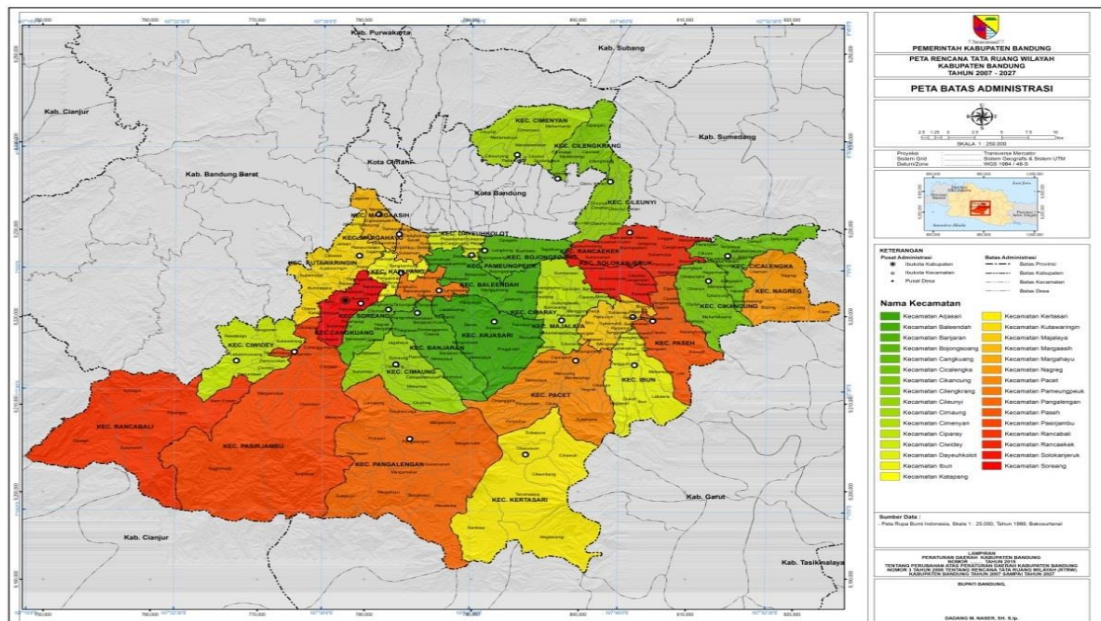
1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran.
2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam.
3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang.
4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC.
5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon.
6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendles.
7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles.
8. Kabupate Bandung masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1816 s/d 1942.

4.1.2 Wilayah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41' – 7°,19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' – 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara: Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, batas Selatan: Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, batas Barat: Kabupaten Cianjur, batas bagian tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi dan batas Timur: Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan.

Jumlah penduduk sebesar 3.534.114 jiwa (Hasil Analisis BPS 2015) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa. Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin

muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm /tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.



Sumber: Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung, 2017.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Bandung

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

4.1.3.1 Visi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

4.1.3.1 Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian yang seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan,
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif.
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Kemandirian Desa.
8. Meningkatkan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah.

4.1.4 Logo Kabupaten Bandung



Sumber: Bagian Humas Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung, 2017.

Gambar 4.2
Logo Pemerintahan Kabupaten Bandung

Keterangan: makna lambang Kabupaten Bandung berbentuk perisai terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. Pada logo dengan gambar gunung (Gb. Tangkuban Perahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa Kab. Bandung termasyhur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung-gunung, dan sebagai ciri memiliki gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang yang terkenal di seluruh Indonesia.
2. Bagian melintang bergerigi, merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh dan kuat, baik secara fisik dalam membendung hawa nafsu.
3. Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun air danau. Kabupaten Bandung di lintasi oleh sungai Citarum, sungai Cikapundung, dan sungai sungai kecil lainnya. danau/situ Patengang, Situ Cileunca, Situ Lembang, Situ Ciburuy, dan danau-danau lainnya.
4. Perisai tertulis dalam pita kuning: REPEH RAPIH KERTARAHARJA artinya adalah REPEH “Suasana kehidupan yang aman dan tentram”, RAPIH “Suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri”, dan KERTARAHARJA “Tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata”

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung (DPPK) adalah salah satu Dinas yang melakukan pelayanan kepada SKPD maupun langsung kepada masyarakat yaitu memungut dan menerima pembayaran Pajak Daerah, melayani kebutuhan dana program kegiatan seluruh SKPD, baik yang dilaksanakan SKPD maupun oleh pihak ketiga dan menyalurkan Bantuan Keuangan dan Hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung (DPPK) mempunyai peran strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Bergabung Dengan Dinas Pendapatan daerah dengan nama yang baru yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dengan nama lainnya SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).

4.2.2 Visi, Misi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

4.2.2.1 Visi

Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai andalan penerimaan pendapatan daerah.

4.2.2.2 Misi

Misi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah :

1. Mengembangkan system informasi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah.
3. Merumuskan dan menyusun aspek egalitas mengenai pendapatan daerah dan penerapannya.
4. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Pembentukan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat DPPK Kabupaten Bandung, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 pasal 29 bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi pendapatan I, pendapatan II, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

4.2.4 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Struktur organisasi adalah suatu gambaran yang memperlihatkan aspek-aspek yang penting dari organisasi. Struktur organisasi dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dalam kerja sama yang baik antara para karyawan dalam suatu perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Kegiatan suatu organisasi/perusahaan akan tercermin dalam struktur organisasinya. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya, karena struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut.

Struktur organisasi formal disusun untuk membantu pencapaian organisasi dengan lebih efektif. Tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasi, yaitu menentukan pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan fungsi serta kedudukan masing-masing seksi dan sub bagian. Adapun struktur organisasi pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

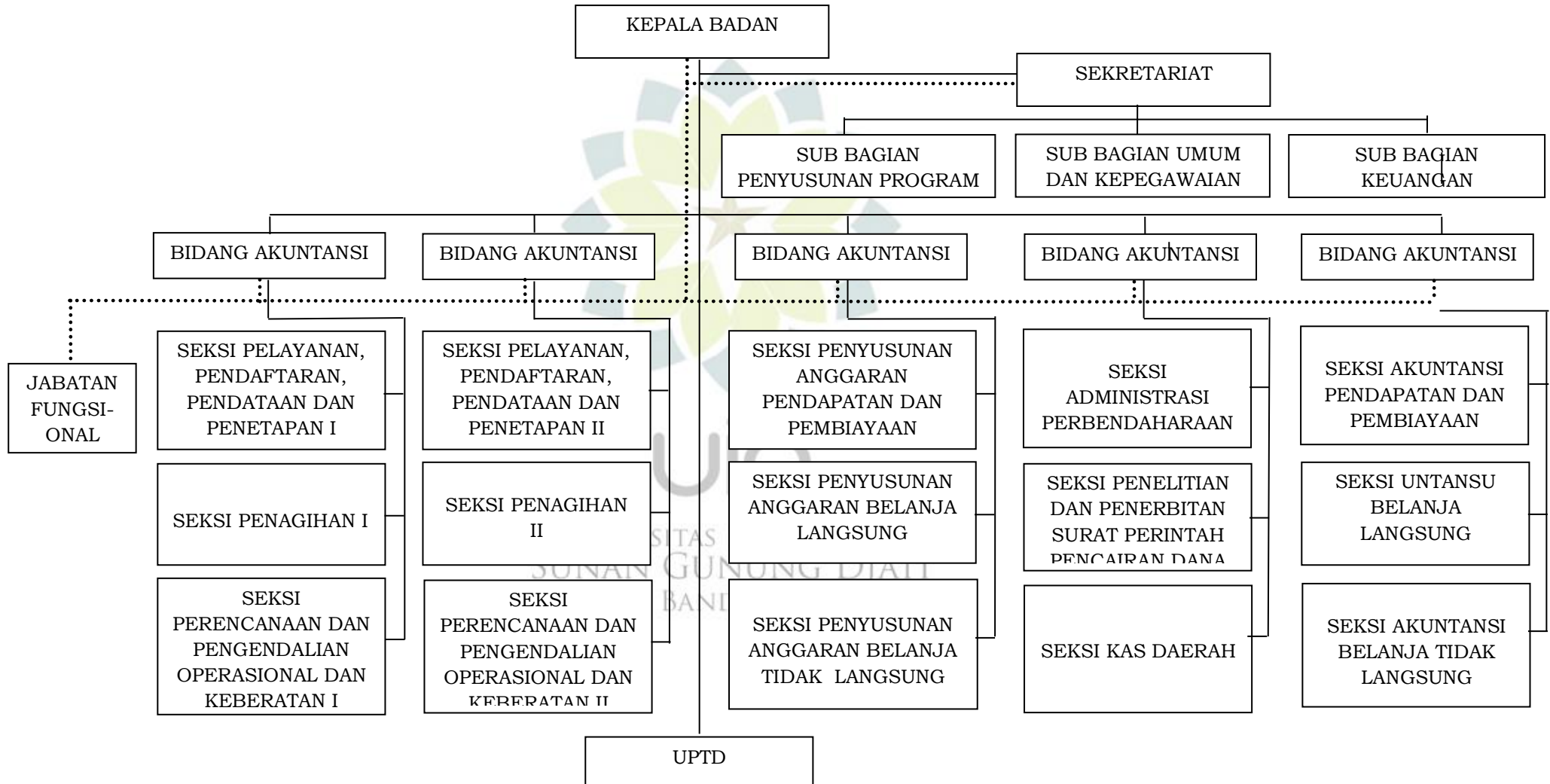




uin

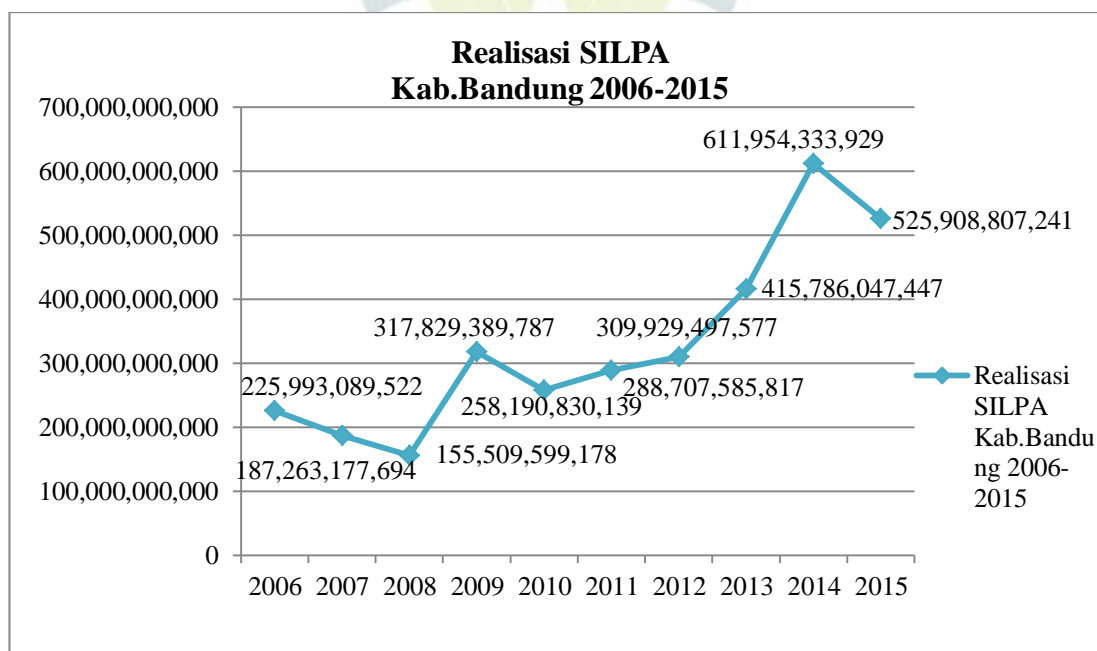
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG



4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah daerah Kabupaten Bandung dengan rentang waktu selama 10 tahun yaitu pada tahun 2006-2015. Data di peroleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (LRAPBD). Berikut adalah rincian mengenai variabel Y yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



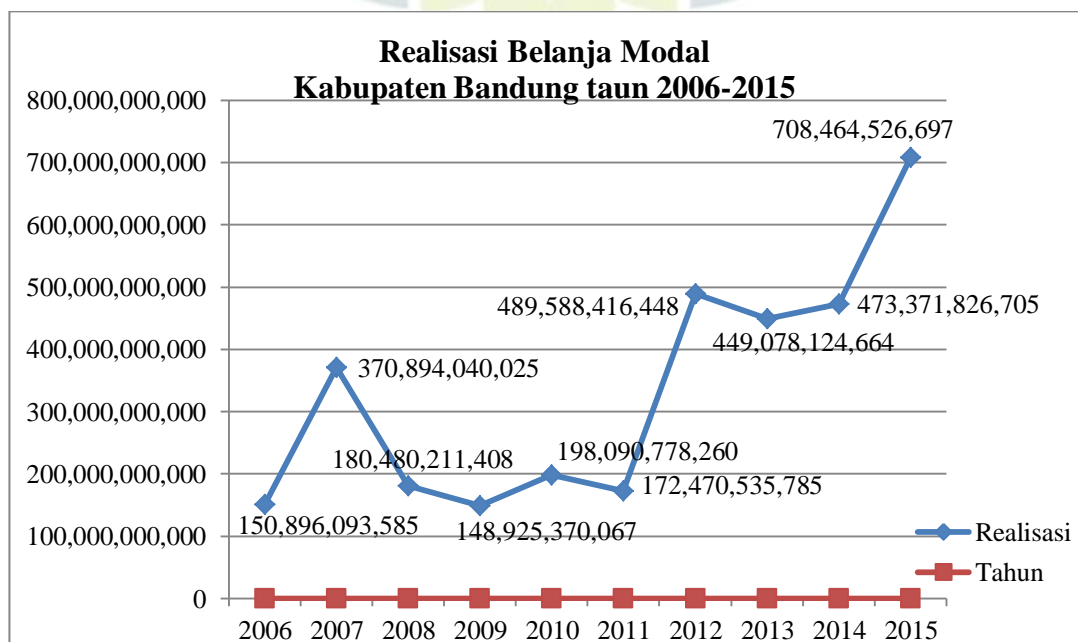
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Gambar 4.3
Target dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015

Berdasarkan gambar 4.3 target dan realisasi SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015, diketahui pada tahun 2006 SILPA menurun dari 225.993.089.522, menjadi 187.263.177.694, pada tahun 2007, pada tahun 2008

kembali mengalami penurunan menjadi 155.509.599.178, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 317.829.389.787, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 258.190.830.139, kemudian pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 288.707.585.817, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 309.929.497.577, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 415.786.047.447 kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 611.954.333.929, dan pada tahun 2015 SILPA mengalami penurunan menjadi 525.908.807.241.

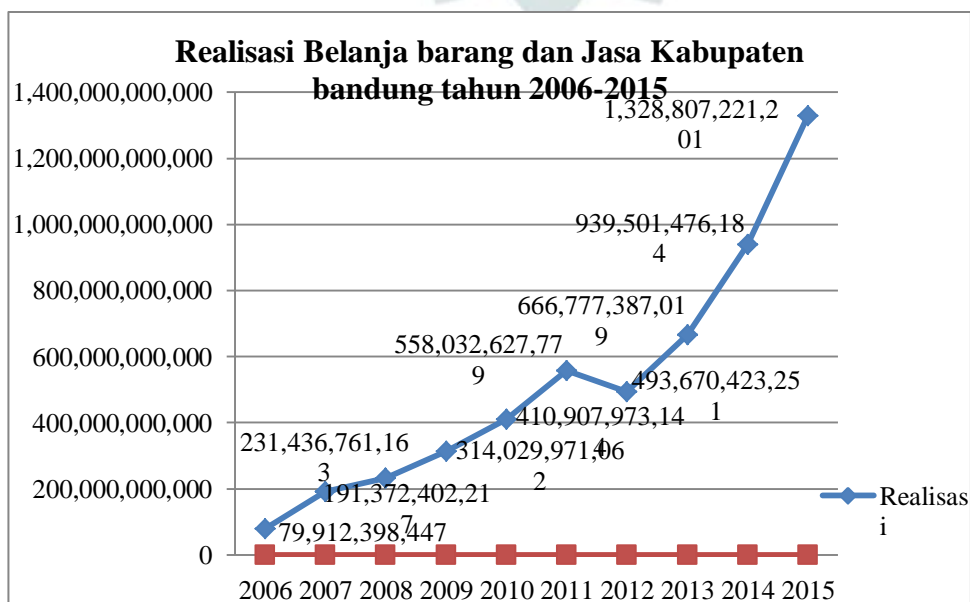
Berikut adalah rincian dimensi-dimensi dari variabel X yaitu Belanja Modal (X1) dan Belanja Barang dan Jasa (X2) yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Gambar 4.4
Target dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2015

Berdasarkan gambar 4.4 target dan realisasi dana bagi hasil di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015, diketahui pada tahun 2006 dana bagi hasil meningkat dari 150.896.093.585 menjadi 370.894.040.025 pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 180.480.211.408, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 148.925.370.067, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 198.090.778.260, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 172.470.535.785, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 489.588.416.448, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 449.078.124.664, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 473.371.826.705, dan pada tahun 2015 dana bagi hasil mengalami peningkatan menjadi 708.464.526.697.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006-2015 (diolah)

Gambar 4.5
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2015

Berdasarkan gambar 4.5 target dan realisasi belanja barang dan jasa di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015, diketahui pada tahun 2006 belanja barang dan jasa meningkat dari 79.912.398.447 menjadi 191.372.402.217 pada tahun 2007, pada tahun 2008 kembali meningkat menjadi 231.436.761.163, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 314.029.971.062, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 410.907.973.144, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 558.032.627.779, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 493.670.423.251, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 666.777.387.019, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 939.501.476.184, dan pada tahun 2015 belanja barang dan jasa meningkat menjadi 1.328.807.221.201.

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum diinterpretasikan lebih lanjut ke dalam model regresi linier berganda, agar model tersebut dapat memberikan hasil estimasi yang akurat maka terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik sebagai berikut :

4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan menggunakan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis*, uji *Kolmogrov-Sminov*, dan *Probability-Plot*

Pedoman pengambilan keputusan jika menggunakan rasio *kurtosis* dan rasio *skewness* dapat dilihat dari nilai rasio *kurtosis* dan rasio *skewness* bila nilai *skewness* dibagi dengan *standard error skewness* dan rasio *kurtosis* dibagi dengan

standard error kurtosis mempunyai nilai yang berada di antara -2 hingga $+2$, maka distribusi data adalah normal. Jika menggunakan *Kolmogrov-Sminov* dapat dilihat dari signifikansi pada nilai *Kolmogrov-Sminov* $< 0,05$ maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai *Kolmogrov-Sminov* $> 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi normal. Jika menggunakan *Probability-Plot* penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti populasi berdistribusi normal.

Berikut ini adalah tabel 4.1 hasil dari uji normalitas menggunakan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* pada program SPSS :

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas menggunakan Rasio *Skewness* dan Rasio *Kurtosis*

	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	,722	,687	-,443	1,334
Valid N (listwise)				

Sumber : Lampiran 1 (**Descriptive Statistics*)

Berdasarkan tabel 4.1 hasil SPSS uji normalitas menggunakan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis*. Dapat dilihat bahwa *rasio skewness* = $0,722 / 0,687 = 1,050$ sedangkan *rasio kurtosis* = $-0,443 / 1,334 = -0,332$. Karena *rasio skewness* dan *rasio kurtosis* berada di antara -2 hingga $+2$, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

Berikut ini adalah tabel 4.2 hasil dari uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Sminov* pada program SPSS :

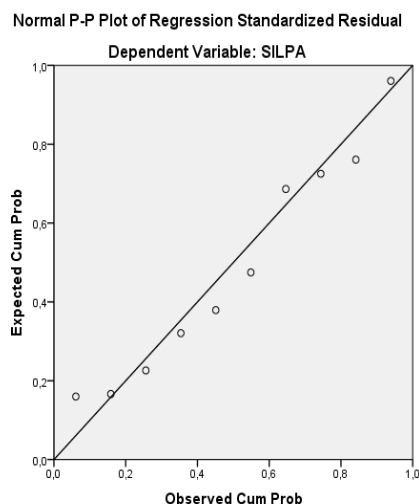
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas menggunakan *Kolmogrov-Sminov*

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000458
	Std. Deviation	69379563066,15219000
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,130
Kolmogorov-Smirnov Z		,431
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Lampiran 2 (**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil SPSS uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* bernilai 0,431 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,992 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.

Berikut ini adalah gambar 4.6 hasil dari uji normalitas menggunakan *Probability-Plot* pada program SPSS :



Sumber : Lampiran 3 (**Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*)

Gambar 4.6
Hasil Uji Normalitas menggunakan *Probability-Plot*

Berdasarkan gambar 4.6 hasil SPSS uji normalitas menggunakan *probability plot* dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal *probability plot* sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal). Artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

4.3.1.2 Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *multikolinearitas* di dalam model regresi dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), yakni :

1. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi *multikolinieritas* terhadap data yang diuji.
1. Jika nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi *multikolinieritas* terhadap data yang diuji.
2. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi *multikolinieritas* terhadap data yang diuji.
3. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi *multikolinieritas* terhadap data yang diuji

Berikut adalah tabel 4.3 hasil dari uji *multikolonearitas* menggunakan program SPSS :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15538999 0051,505	51850494 402,457		2,997 ,020		
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137 ,895	,341	2,930
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995 ,020	,341	2,930

a. Dependent Variable : SILPA

Sumber : Lampiran 4 (*Coefficients^a*)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 0,341 dan VIF sebesar 2,930. Nilai *tolerance* variabel independen sebesar lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi *multikolinieritas*.

4.3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji *heterokedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Dalam pengujian *heteroskedastisitas* peneliti menggunakan Uji Glejser. Kriteria dalam menentukan uji *heterokedastisitas* adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi *heterokedastisitas*.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi *heterokedastisitas*.

Berikut ini adalah tabel 4.4 hasil dari uji *heterokedastisitas* menggunakan program SPSS :

Tabel 4.4
Hasil Uji *Heterokedastisitas*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47822027600,113	20514544297,774		2,331	,053
	Belanja Modal	-,143	,092	-,750	-1,549	,165
	Belanja Barang	,107	,047	1,106	2,282	,056

Sumber : Lampiran 5 (*Coefficients^a*)

Berdasarkan tabel 4.4 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Modal sebesar 0,165, variabel Belanja Barang dan Jasa sebesar 0,56. Kedua variabel independen diatas mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi *heterokedastisitas*.

4.3.1.4 Uji *Autokorelasi*

Uji *Autokorelasi* ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai *Durbin Watson* (DW) dengan nilai du (batas atas) dan dl (batas bawah).

Berikut ini adalah tabel 4.5 hasil dari uji *autokorelasi* menggunakan program SPSS :

Tabel 4.5
Hasil Uji *Autokorelasi* menggunakan *Durbin Waton*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,663 ^a	,439	,279	31125244202,55975	1,826
a. Predictor: (Constant), Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa					
b. Dependent Variable: SILPA					

Sumber : Lampiran 6 (*Model Summary^b*)

Tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 5\%$), jumlah variabel bebas $k = 2$ dan jumlah sampel $n = 10$ dengan nilai *durbin watson* 1,826 maka : $d_L = 0,697$, $d_u = 1,641$, $3-d_u = 1,359$, $3-d_L = 2,303$. (Lampiran 10)

Kriteria Pengujian :

H_0 diterima jika $d_u < d < 3-d_u$ (tidak ada *autokorelasi* positif/negatif)

H_0 ditolak jika :

$d < d_L$ (ada *autokorelasi* positif)

$d > 3-d_L$ (ada *autokorelasi* negatif)

Tidak dapat disimpulkan :

$d_L = d = d_u$ atau $3-d_u = d = 3-d_L$ (daerah keragu-raguan)

Pengambilan keputusan ada tidaknya *autokorelasi*:

Tabel 4.6
Klasifikasi Nilai *Durbin Waston* untuk *Autokorelasi*

Nilai	Keterangan
$<1,10$	Ada <i>autokorelasi</i>
$1,10 - 1,54$	Tidak ada kesimpulan
$1,55 - 2,45$	Tidak ada <i>autokorelasi</i>
$2,46 - 2,90$	Tidak ada kesimpulan
$>2,91$	Ada <i>autokorelasi</i>

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa $d_L (0,697) \leq d_{hitung} (1,826) \geq d_u (1,641)$. Hal ini berarti d_{hitung} berada pada daerah keragu-raguan, dan berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Waston* untuk penelitian ini adalah sebesar 1,826. Karena nilai tersebut terletak antara 1,55 dan 2,45 pada tabel 4.6 klasifikasi nilai *Durbin Waston* untuk *autokorelasi*, maka hasil tidak ada *autokorelasi*

4.3.2 Pengujian Hipotesis

4.3.2.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen (*criterion*) tunggal dengan beberapa variabel-variabel independen (*predictor*) (Silalahi, 2012 : 430).

Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	=	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
β_0	=	Konstanta
β_1, β_2	=	Koefisien regresi
X_1	=	Belanja Modal
X_2	=	Belanja Barang dan Jasa
E	=	Error

Menggunakan persamaan ini bertujuan untuk meramalkan nilai Y atas dasar nilai-nilai X_1, X_2, \dots, X_k yang kita tentukan. Koefisien regresi menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel yang diteliti tersebut. Setiap variabel yang diteliti (X_1 dan X_2) merupakan variabel bebas terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Mengamati realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksudkan untuk mengamati variabel-variabel tersebut terhadap pencapaian target / realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk menggunakan variabel-variabel independen yang nilainya diketahui untuk memprediksi nilai dependen tunggal yang dipilih oleh peneliti. Dua atau lebih variabel independen (dinaikkan atau diturunkan nilainya) digunakan sebagai *predictor* untuk memprediksi atau meramalkan keadaan (naik atau turunnya) variabel dependen sebagai yang diprediksi (Silalahi, 2009 : 431).

Berikut ini adalah tabel 4.7 hasil dari analisis regresi menggunakan program SPSS:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1553899900	518504944		2,997	,020
		51,505	02,457			
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137	,895
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995	,020

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber : Lampiran 7 (*Coefficients^a*)

$$Y = (1553899900 + 51,505) + (-0,032) X_1 + (0,355) X_2$$

1. Konstanta sebesar 1553899900 + 51,505 artinya jika Belanja Modal (X_1) dan Belanja Barang dan Jasa (X_2), nilainya adalah 0, maka Belanja Daerah (Y) nilainya adalah 1553899900 + 51,505.
2. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X_1) sebesar -0,032 artinya bahwa setiap Belanja Modal sebesar satuan skala interval akan meningkatkan SILPA. Koefisien dalam regresi variabel Belanja Modal (X_1) bernilai negatif artinya tidak terjadi hubungan antara Belanja Modal dengan SILPA

apabila Belanja Modal menurun maka SILPA pun akan menurun sebesar - 0,032

3. Koefisien regresi variabel Belanja Barang dan Jasa (X_2) sebesar 0,355 artinya bahwa setiap Belanja Barang dan Jasa sebesar satuan skala interval akan meningkatkan SILPA. Koefisien dalam regresi variabel Belanja Barang dan Jasa (X_2) bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Belanja Barang dan Jasa dengan SILPA apabila Belanja Barang dan Jasa meningkat maka SILPA pun akan ikut meningkat sebesar 0,355.

1.3.2.2 Signifikansi Regresi Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya atau pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Pada penelitian ini, uji-t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen Belanja Modal (X_1) dan Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh terhadap SILPA (Y).

1. Menguji pengaruh Belanja Modal terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$: Berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

$H_1 : \beta_1 > 0$: Berarti Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap
SILPA

b. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df (n-k-1) = (10-2-1) = 7$, dan dengan tingkat signifikansi = 0.05. Maka uji sisi kanan dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 2,365 (Lampiran 11).

c. Kriteria Pengujian

1) Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} :

- a) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)
- b) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS

- a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- b) Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

d. Perhitungan

Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar -0,137 dengan tingkat signifikansi 0,895. Berikut ini adalah tabel 4.8 hasil dari Uji Regresi Parsial (Uji T) Belanja Modal:

Tabel 4.8
Uji Regresi Parsial (Uji T) Belanja Modal

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1553899900	5185049440		2,997	,020
		51,505	2,457			
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137	,895
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995	,020

Sumber : Lampiran 7 (*Coefficients^a*)

e. Membuat kesimpulan

Jadi karena $t_{hitung} (-0,137) < t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,895 > 0.05$ maka H_0 diterima, hal ini berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.

2. Menguji pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$: Berarti Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

$H_1 : \beta_1 > 0$: Berarti Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

b. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df (n-k-1) = (10-2-1) = 7$, dan dengan tingkat signifikansi = 0,05. Maka uji sisi kanan dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 2,365 (Lampiran 11).

c. Kriteria pengujian

1) Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} :

a) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

b) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS

a) Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

b) Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

b. Perhitungan

Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 2,995 dengan tingkat signifikansi 0,020. Berikut ini adalah tabel 4.9 hasil Uji Regresi Parsial (Uji T) Belanja Barang dan Jasa:

Tabel 4.9
Uji Regresi Parsial (Uji T) Belanja Barang dan Jasa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1553899900 51,505	5185049440 2,457		2,997 ,020
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137 ,895
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995 ,020

Sumber : Lampiran 7 (*Coefficients^a*)

c. Membuat Kesimpulan

Jadi karena $t_{hitung} (2,995) > t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,020 > 0,05$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara parsial terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015.

2.3.2.2 Signifikansi Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik *inferensial*. Pengujian hipotesis yang pertama adalah menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel-variabel bebas berupa Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa secara bersama-sama mempunyai hubungan *linear* dan dapat menjelaskan variabel terikat yakni SILPA.

Maka dari itu, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Belanja Modal (X_1) dan Belanja Barang dan Jasa (X_2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen SILPA (Y).

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan pendekatan pengujian tingkat penting (*test of significance*) yaitu suatu pengujian atas statistik uji (*estimator*) yaitu keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_0) atas dasar nilai statistik uji yang diperoleh dari data yang dimiliki.

Pengujian hipotesis ini menggunakan statistik uji F melalui pendekatan *analysis of variance* (anova). Uji F dengan pendekatan anova ini bertujuan menguji apakah ada pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$: Berarti Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

$H_1 : \beta_1 > 0$: Berarti Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara parsial terhadap SILPA

2. Taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 % dengan derajat kebebasan $df = (k-1)(n-k)$ maka $F_{tabel} = (2-1)(10-2) = (1)(8) = 5,32$ (Lampiran 7).

3. Kriteria pengujian

a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X_1, X_2 , dan X_3) terhadap variabel dependen (Y)

b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X_1, X_2 , dan X_3) terhadap variabel dependen (Y).

4. Perhitungan

Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 12,197 dengan tingkat signifikansi 0,005. Berikut ini adalah tabel 4.10 hasil uji F:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15096588907656 0710000000,000	2	75482944538280 355000000,000	12,197	,005 ^b
Residual	43321713941251 740000000,000	7	61888162773216 77000000,000		
Total	19428760301781 2440000000,000	9			

Sumber : Lampiran 8 (ANOVA^a)

5. Membuat Kesimpulan

Berdasarkan pengujian data menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(12,197) > (5,32)$, maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015.

2.3.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015. Dari hasil perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 ^a	,659	,616	234856925184,25085
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa				
b. Dependent Variable: SILPA				

Sumber : Lampiran 9 (*Model Summary*^b)

Angka R Square (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persentase, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,659 atau 6,59%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa) terhadap variabel dependen yaitu SILPA sebesar 69,5% sedangkan 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel 4.12 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi:

Tabel 4.12
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
81% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80 %	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah Tapi Pasti
0% - 4%	Rendah atau Lemah Sekali

Sumber : Sugiono (2001:183)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas terlihat jelas bahwa nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 69,5% masuk kedalam kriteria pengaruh yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dan belanja Barang dan Jasa memiliki peran yang sangat penting dalam SILPA.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015

Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X_1) sebesar -0,032 artinya bahwa setiap Belanja Modal sebesar satuan skala interval akan meningkatkan SILPA. Koefisien dalam regresi variabel Belanja Modal (X_1) bernilai negatif artinya tidak terjadi hubungan positif antara Belanja Modal dengan SILPA apabila Belanja Modal menurun maka SILPA akan ikut menurun.

Pengujian secara parsial Belanja Modal terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015 memperoleh nilai $t_{hitung} (-0,137) < t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,895 > 0,05$ maka H_0 diterima, hal ini berarti Belanja

Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015.

Belanja Modal merupakan merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja modal digunakan untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat daerah akan fasilitas, sarana dan prasarana publik dan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan iklim investasi di daerah. Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk pemenuhan dan penambahan aset tetap yang dapat mendukung dan memperlancar tugas pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memadai.

Tinggi atau rendahnya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap SILPA karena tinggi atau rendahnya Belanja Modal lebih berpengaruh pada pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan di daerah yang sedang membutuhkan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan teori Lee & Plummer (2007 : 188) yang menyatakan bahwa sisa anggaran dari belanja modal yang di alokasikan untuk aset tetap yang tidak terealisasi seluruhnya akan menyebabkan terjadinya akumulasi sisa anggaran yang besar pada akhir tahun anggaran.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Martini pada tahun 2015 yang meneliti mengenai Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap SILPA (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Bali) hasil

penelitian sebelumnya menyatakan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap SILPA.

4.4.2 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA pada Tahun 2006-2015

Koefisien regresi variabel Belanja Barang dan Jasa (X_2) sebesar 0,355 artinya bahwa setiap Belanja Barang dan Jasa sebesar satuan skala interval akan meningkatkan SILPA. Koefisien dalam regresi variabel Belanja Barang dan Jasa (X_2) bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Belanja Barang dan Jasa dengan SILPA apabila Belanja Barang dan Jasa meningkat maka SILPA pun akan ikut meningkat.

Pengujian secara parsial Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015 memperoleh nilai $t_{hitung} (2,995) > t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,020 > 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara parsial terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015 terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA.

Belanja barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan.

Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap SILPA disebabkan karena Belanja Barang dan Jasa merupakan komponen dari Belanja Langsung yang secara absolut nilainya jauh lebih besar dibanding Belanja Moda. Belanja Barang

dan Jasa sendiri digunakan dalam membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi Kementerian/Lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori Iswahyudin (2015 : 165) yang menyatakan bahwa semakin besar belanja barang dan jasa terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil belanja barang dan jasa yang terealisasi maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun akan besar walaupun pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iswahyudin pada tahun 2015 mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah), hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa memiliki pengaruh terhadap SILPA.

4.4.3 Pengaruh Belanja Langsung terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015

Hasil analisis pengujian regresi secara simultan dengan uji-F, menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(12,197) > (5,32)$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti Belanja Langsung berpengaruh secara simultan terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015.

Nilai koefisien determinasi yaitu R (*R Square*) sebesar 0,695 atau 69,5%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (Belanja

Modal dan Belanja Barang dan Jasa) terhadap variabel dependen yaitu SILPA sebesar 69,5 % sedangkan 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Belanja Langsung merupakan belanja yang mempengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa. Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa dan hubungannya terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Belanja Langsung berpengaruh terhadap SILPA karena SILPA yang terjadi akhir tahun berasal dari sisa belanja langsung yang realisasinya tidak mencapai target anggaran, pelampauan dana (*over estimate*) pada belanja langsung, dan sisa anggaran dari beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori Riwo Kaho (2001:61) yang menyatakan bahwa bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin banyak pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut, sehingga jika kegiatan di suatu daerah terjadi kekurangan kegiatan maka

dapat menimbulkan sisa lebih anggaran, sehingga sisa lebih anggaran yang terjadi dapat digunakan untuk periode berikutnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian tentang “ Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian secara parsial belanja modal terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) memperoleh nilai $t_{hitung} (-0,137) < t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,895 > 0.05$ maka H_0 diterima, hal ini berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015.
2. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian secara parsial belanja barang dan jasa terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) memperoleh nilai $t_{hitung} (2,995) > t_{tabel} (2,365)$ dengan taraf signifikansi $0,020 > 0.05$ maka H_0 ditolak, yang berarti Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara parsial terhadap

SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015 terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Barang dan Jasa terhadap SILPA.

3. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian secara simultan dengan uji-F, menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(12,197) > (5,32)$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti Belanja Langsung berpengaruh secara simultan terhadap SILPA di Kabupaten Bandung pada Tahun 2006-2015. Persentase pengaruh variabel independen (belanja modal dan belanja barang dan jasa) terhadap variabel dependen yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar nilai koefisien determinasi yaitu R^2 (R Square) sebesar 0,695 atau 69,5%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa) terhadap variabel dependen yaitu SILPA sebesar 69,5 % sedangkan 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.2. Saran

Berbagai kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini mengandung beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan lagi teori-teori akademisi dalam rangka memberikan sebuah kontribusi pemikiran dalam segi efek keilmuan dan

secara akademik dalam mengembangkan konsep-konsep serta teori-teori Administrasi Publik, Otonomi Daerah, Keuangan daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis, maka bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja yang berasal dari belanja langsung. Belanja langsung sendiri terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan belanja langsung dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), agar realisasi dari belanja modal terealisasi dengan baik sehingga sisa anggaran di akhir tahun sama dengan nol. Selain itu bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan target dan realisasi pengeluaran daerah dan sisa anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku Teks :

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu administrasi negara*. Bandung : Pustaka Setia.

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Pustaka Setia.

Budi, Purnomo. 2009. *Obligasi Daerah*. Alfabeta

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syafi'ie, Kencana Inu. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga

Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Siagian, P. Sondang. 2004. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksara

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Widjadja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Press

Yeremias, T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, & Isu. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Gava Media

2. Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Karya Ilmiah :

Dian Andalia (2012) yang berjudul Pengaruh Varian Pendapatan dan Varian Belanja terhadap Sisa Anggaran Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Se Aceh)

Iswahyudin (2015) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah)

Siti Fatmawati (2013) yang berjudul Pengaruh Belanja Langsung terhadap SILPA (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Timur)

4. Dokumen :

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung 2006-2015

Lampiran 1

Uji Normalitas Menggunakan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis*

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Belanja Modal	10	,727	,687	-,443	1,334
Valid N (listwise)	10				

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2
/STATISTICS=KURTOSIS SKEWNESS.

Lampiran 2

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov*

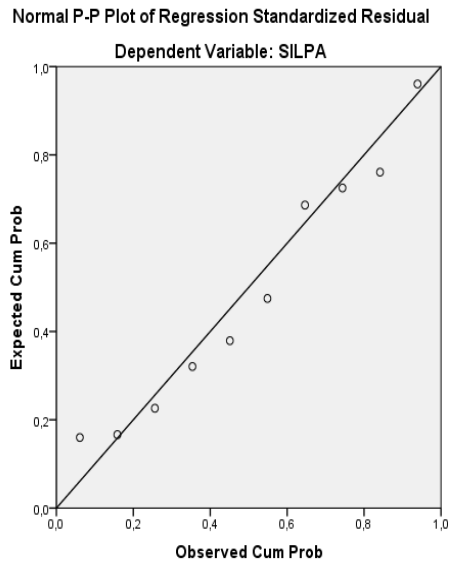
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000458
	Std. Deviation	69379563066,15219000
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,130
Kolmogorov-Smirnov Z		,431
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3

Uji normalitas menggunakan *Probability-Plot*



Lampiran 4

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	155389990051,505	51850494402,457		2,997	,020
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137	,895
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995	,020

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	Belanja Modal	,341	2,930
	Belanja Barang	,341	2,930

a. Dependent Variable: SILPA

Lampiran 5

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	47822027600,1	20514544297,7			
		13	74	2,331	,053	
	Belanja Modal	-,143	,092	-,750	-1,549	,165
	Belanja Barang	,107	,047	1,106	2,282	,056

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 6

Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,663 ^a	,439	,279	31125244202,5 5975	1,826

a. Predictors: (Constant), Belanja Barang, Belanja Modal

b. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNING DJATI Analisis regresi berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	155389990051,	51850494402,4			
		505	57	2,997	,020	
	Belanja Modal	-,032	,233	-,042	-,137	,895
	Belanja Barang	,355	,118	,915	2,995	,020

a. Dependent Variable: SILPA

Lampiran 8

Hasil uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	1509658890765 6071000000,0 00	2	7548294453828 0355000000,00 0	12,197	,005 ^b
	4332171394125 1740000000,00 0	7	6188816277321 677000000,000		
	1942876030178 12440000000,0 00	9			

a. Dependent Variable: SILPA

b. Predictors: (Constant), Belanja Barang, Belanja Modal

Lampiran 9

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 ^a	,659	,616	234856925184, 25085

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal